



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I MADE MANDI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **426443**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.070.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/288 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.170.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/400 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 393.500.000**

1. MOTOR, HONDA NC110D Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK51.5RSCVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. MOBIL, HONDA HONDA CR-V 2.0 MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 27.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 129.866.944****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Sub Total | Rp. | 2.620.366.944 |
| III. HUTANG | Rp. | 92.803.485 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.527.563.459 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.